

Penguatan Tata Kelola untuk Pembangunan Desa yang Unggul di Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung

Strengthening Village Governance for Excellent Village Development at Paseh Sub-District Bandung Regency

¹Laksmi Fitriani, ^{2*}Iwan Kurniawan, ³Ramdani Priatna, ⁴Hendrikus T. Gedeona

^{1,2,3,4}Politeknik STIA LAN Bandung

e-mail: ¹laksmi.fitriani@poltek.stialanbandung.ac.id; ²iwan.kurniawan@poltek.stialanbandung.ac.id;

³ramdanipriatna@poltek.stialanbandung.ac.id; ⁴hendrikus@poltek.stialanbandung.ac.id

Informasi Artikel: (Dikirim 28/12/24; Revisi 30/11/24; Diterima 31/12/24)

ABSTRAK

Pembangunan desa yang unggul membutuhkan tata kelola yang baik sebagai fondasi utama. Kecamatan Paseh, Kabupaten Bandung, merupakan wilayah dengan potensi besar, namun masih menghadapi berbagai tantangan dalam tata kelola desa, termasuk dalam hal administrasi, partisipasi masyarakat, dan pengelolaan sumber daya. Program pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk memperkuat tata kelola desa di Kecamatan Paseh melalui pendekatan partisipatif dan kolaboratif. Metode yang digunakan meliputi pelatihan, pendampingan teknis, dan diskusi kelompok terarah (FGD) dengan pemerintah desa dan masyarakat setempat. Hasil kegiatan ini menunjukkan peningkatan pemahaman perangkat desa terhadap prinsip tata kelola yang baik, seperti transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi. Selain itu, program ini berhasil mendorong partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan pembangunan desa. Dampak program ini tidak hanya meningkatkan efektivitas pengelolaan administrasi desa tetapi juga menciptakan sinergi antara pemerintah desa dan masyarakat. Rekomendasi yang dihasilkan mencakup perlunya pengembangan sistem informasi desa, pelatihan berkelanjutan, dan pembentukan forum komunikasi desa untuk keberlanjutan program. Dengan penguatan tata kelola desa ini, Kecamatan Paseh diharapkan mampu menjadi model pembangunan desa yang unggul dan berkelanjutan di Kabupaten Bandung.

Kata kunci: tata kelola desa, pembangunan desa, partisipasi masyarakat,

Keywords: village governance, village development, community participation

© The Author(s)



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

ABSTRACT

Sustainable village development requires good governance as its main foundation. Paseh Sub-district, Bandung Regency, is an area with significant potential but faces various challenges in village governance, including issues in administration, community participation, and resource management. This community service program aims to strengthen village governance in Paseh Sub-district through a participatory and collaborative approach. The methods employed include training, technical assistance, and focus group discussions (FGD) with village government officials and local communities. The results of this activity show an increased understanding of village officials regarding the principles of good governance, such as transparency, accountability, and participation. Additionally, this program successfully encouraged community participation in the planning and decision-making processes of village development. The impact of this program not only improved the effectiveness of village administration management but also created synergy between the

village government and the community. The recommendations generated include the need to develop a village information system, continuous training, and the establishment of a village communication forum for the sustainability of the program. With strengthened village governance, Paseh Sub-district is expected to become a model for excellent and sustainable village development in Bandung Regency..

1. PENDAHULUAN

Pembangunan desa yang unggul merupakan salah satu pilar penting dalam mencapai kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Desa memiliki potensi besar untuk menjadi motor penggerak pembangunan jika dikelola dengan tata kelola yang baik. Dalam konteks ini, penguatan tata kelola desa menjadi sangat krusial, karena tata kelola yang baik mampu mendorong partisipasi masyarakat, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya desa. Tata kelola yang kuat tidak hanya membangun kepercayaan masyarakat kepada pemerintah desa tetapi juga menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pengembangan potensi desa secara berkelanjutan. Mesa dan Udju mengungkapkan bahwa pembangunan infrastruktur yang baik dan pengembangan potensi ekonomi lokal adalah kunci untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa (Mesa & Udju, 2023). Selain itu, Dor menambahkan bahwa pengawasan yang efektif oleh Badan Permusyawaratan Desa dapat memperkuat proses pembangunan desa dan memastikan bahwa kebutuhan masyarakat terpenuhi (Dor et al., 2023). Hal ini sejalan dengan pandangan Abu yang menyatakan bahwa dana desa berfungsi sebagai pendorong bagi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat (Abu, 2020).

Menurut Cahyadi dan Basyari, keberhasilan pembangunan desa secara mandiri dapat meningkatkan indeks kemakmuran masyarakat Indonesia, yang menunjukkan pentingnya tata kelola yang efektif dalam mencapai tujuan pembangunan desa (Cahyadi & Basyari, 2023). Sari et al. juga menekankan bahwa pengembangan potensi desa melalui optimalisasi sumber daya yang ada sangat penting untuk mencapai kemajuan desa (Sari et al., 2022). Berbagai penelitian menunjukkan bahwa pengembangan potensi desa melalui pendekatan berbasis peraturan dan partisipasi masyarakat dapat membawa dampak positif yang signifikan. Misalnya, penelitian Tijow & Abdussamad (2021) menggarisbawahi pentingnya sosialisasi dan penyuluhan terkait peraturan desa sebagai langkah strategis untuk meningkatkan pemahaman aparat dan masyarakat. Sosialisasi ini tidak hanya membantu masyarakat memahami hak dan tanggung jawabnya tetapi juga mendorong mereka untuk berperan aktif dalam proses pembangunan. Dengan demikian, peraturan desa tidak hanya menjadi dokumen formal tetapi juga menjadi alat transformasi yang efektif dalam meningkatkan kapasitas masyarakat untuk berkolaborasi dalam pembangunan.

Selain itu, pelatihan dan pendampingan dalam penyusunan dokumen perencanaan seperti Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) berbasis local governance juga menjadi kunci penting. Haryanto et al. (2023) menunjukkan bahwa pendekatan ini dapat meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat secara signifikan dalam pembangunan desa yang berkelanjutan. Pendekatan berbasis lokal ini memungkinkan masyarakat untuk terlibat langsung dalam merancang program yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa mereka. Dengan kolaborasi antara pemerintah desa, masyarakat, dan pendamping profesional, pembangunan desa tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah tetapi juga gerakan kolektif untuk mencapai kemajuan yang inklusif dan berkelanjutan.

Lebih lanjut, pelatihan peningkatan peran dan fungsi pendamping desa juga menjadi faktor penting dalam meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di tingkat desa. Penelitian yang dilakukan oleh Hidayat et al., (2023) menunjukkan bahwa kurangnya kapasitas fasilitator desa dapat menghambat proses

perencanaan pembangunan yang partisipatif. Oleh karena itu, program pengabdian masyarakat yang memberikan pelatihan kepada calon fasilitator desa sangat diperlukan untuk membangun rasa memiliki dan meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan. Selain itu, pengelolaan keuangan desa yang berbasis akuntansi juga menjadi aspek penting dalam meningkatkan akuntabilitas pemerintah desa, seperti yang diungkapkan oleh Adan et al. (2022).

Segala permasalahan tata kelola desa dari penelitian-penelitian sebelumnya yang ada di Indonesia termasuk Kecamatan Paseh, Kabupaten Bandung memerlukan perhatian serius dari semua pihak, termasuk pemerintah daerah, masyarakat, dan lembaga terkait. Masih ada beberapa yang belum efektif mengenai tata kelola desa yang baik (Bismo & Sahputra, 2021; Yunas et al., 2024; Nuroniyah, 2023). Upaya untuk meningkatkan kapasitas SDM, transparansi, partisipasi masyarakat, serta pengawasan yang ketat terhadap pengelolaan dana desa sangat penting untuk menciptakan tata kelola desa yang baik dan berkelanjutan.

Dalam konteks pemetaan desa, Handoko & Tucunan (2021) menunjukkan bahwa metode partisipatif dalam pembuatan peta desa dapat meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan. Pemetaan yang melibatkan masyarakat tidak hanya memberikan data yang akurat tetapi juga membangun rasa kepemilikan terhadap proses pembangunan. Oleh karena itu, penguatan tata kelola desa harus mencakup berbagai aspek, mulai dari perencanaan, pengelolaan keuangan, hingga partisipasi masyarakat dalam setiap tahap pembangunan. Dengan demikian, penguatan tata kelola desa diharapkan dapat menciptakan desa yang unggul dan mandiri, serta mampu berkontribusi pada pembangunan nasional yang berkelanjutan.

2. METODE PELAKSANAAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PkM) di Kecamatan Paseh, Kabupaten Bandung, dilaksanakan pada tanggal 20-21 Agustus 2024. Sasaran kegiatan ini meliputi Sekretaris Desa, Kasie Pemerintahan, dan Ketua BPD dari desa-desa di Kecamatan Paseh, dengan total peserta sebanyak 36 peserta. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman peserta tentang tata kelola pembangunan desa yang unggul melalui lima tahapan utama:

1. Sesi Pembukaan
Kegiatan dibuka oleh Ramdani Priatna selaku ketua Tim PkM dari Politeknik STIA LAN Bandung, bersama Eet Latifah, Sekretaris Kecamatan Paseh. Pada sesi ini, disampaikan maksud dan tujuan program sebagai langkah awal dalam memahami tata kelola pembangunan desa.
2. Sesi Penyampaian Materi
Hendrikus T. Gedeona, Iwan Kurniawan, dan Laksmi Fitriani dari Politeknik STIA LAN Bandung menyampaikan materi yang mencakup konsep tata kelola desa unggul, arah kebijakan desa, good governance, pengelolaan keuangan, dan implementasi desa unggul.
3. Sesi Diskusi
Sesi ini melibatkan diskusi aktif yang dipimpin oleh tim PkM dengan membahas materi secara mendalam, termasuk tantangan dan strategi implementasi konsep desa unggul.
4. Sesi Evaluasi
Dilakukan evaluasi atas pemahaman dan capaian peserta terhadap materi yang disampaikan. Evaluasi ini bertujuan merumuskan langkah strategis yang dapat diimplementasikan untuk mewujudkan desa yang unggul di wilayah mereka.
5. Sesi Penutup
Kegiatan diakhiri dengan sesi foto bersama dan penyerahan kenang-kenangan dari tim PkM Politeknik STIA LAN Bandung kepada para peserta sebagai bentuk apresiasi atas partisipasi mereka.

Indikator keberhasilan program meliputi peningkatan pemahaman peserta terhadap konsep tata kelola desa unggul, keterlibatan aktif peserta dalam diskusi, dan rencana implementasi yang disusun setelah kegiatan. Teknik analisis yang digunakan adalah evaluasi kualitatif berdasarkan respons dan masukan peserta selama

kegiatan. Tim PkM berperan aktif dalam menyampaikan materi, memfasilitasi diskusi, dan mengevaluasi program untuk memastikan keberhasilannya.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebelum melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat, tim PkM dari Politeknik STIA LAN Bandung melakukan survei awal. Selama proses ini, tim PkM mengadakan pertemuan dengan sekretaris kecamatan di kantor Kecamatan Paseh, Kabupaten Bandung. Kegiatan ini serupa dengan metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian masyarakat lainnya. Misalnya, tim PkM di Wayhalim, Bandar Lampung, melakukan survei lokasi dan berbicara langsung dengan pihak terkait sebelum memulai kegiatan (Utami et al., 2023). Selain itu, survei awal juga digunakan dalam kegiatan pelatihan di Nusa Tenggara Timur untuk mendapatkan informasi yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan, menunjukkan betapa pentingnya survei untuk membuat rencana (Blegur, 2022).



Gambar 1. Survei Lokasi Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung
Sumber: Diolah Penulis, 2024

Tim PkM Politeknik STIA LAN Bandung mengangkat topik tata kelola desa setelah berbicara dengan Sekretaris Kecamatan Paseh. Tim PkM mendapatkan banyak informasi tentang kondisi lokasi dan masalah yang dihadapi aparat desa setempat. Kegiatan pengabdian ini menekankan pentingnya prinsip *good governance* dalam pengelolaan dana desa. Rahmatullah dan Rahmatullah menekankan bahwa implementasi *good governance* dalam pengelolaan dana desa sangat penting untuk mencapai transparansi dan akuntabilitas (Rahmatullah & Rahmatullah, 2021). Selain itu, kegiatan PkM memberikan pemahaman tentang prinsip-prinsip ini akan membantu desa dalam mengelola dana dengan lebih baik. Kemitraan dengan Kabupaten Bandung yang dilakukan oleh Politeknik STIA LAN Bandung adalah bukti nyata dari kerja sama ini dengan melakukan advokasi dalam mewujudkan pembangunan desa yang unggul.



Gambar 2. Spanduk Kegiatan PkM
Sumber: Diolah Penulis, 2024

Tim Politeknik STIA LAN Bandung membuat spanduk untuk sosialisasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini. Spanduk berfungsi sebagai alat komunikasi visual yang efektif. Menurut Munanjar, spanduk dapat digunakan untuk menyampaikan informasi penting kepada masyarakat dengan cara yang menarik dan mudah dipahami (Munanjar et al., 2023). Dalam kegiatan pengabdian masyarakat, spanduk dapat menampilkan informasi mengenai waktu, tempat, dan tujuan kegiatan, sehingga masyarakat dapat lebih mudah mengakses informasi tersebut. Hal ini sejalan dengan penelitian oleh Munanjar yang menunjukkan bahwa anggota masyarakat yang terlibat dalam pelatihan desain grafis untuk pembuatan spanduk merasa lebih percaya diri dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat (Munanjar, 2023). Selain itu, spanduk dapat digunakan untuk memperkuat identitas dan branding suatu program atau kegiatan. Yanto et al. menekankan bahwa desain yang menarik pada spanduk dapat membantu menciptakan kesan positif dan meningkatkan brand awareness (Yanto et al., 2022). Dalam kegiatan pengabdian masyarakat, hal ini penting untuk membangun citra positif dan kepercayaan masyarakat terhadap program yang dilaksanakan.

Kedua pihak yang terlibat, Politeknik STIA LAN Bandung dan Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung, menyampaikan sambutan saat kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) dimulai. Sambutan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat merupakan momen penting untuk menyampaikan tujuan, harapan, dan semangat dari kegiatan tersebut. Sambutan memberikan kesempatan bagi penyelenggara untuk menjelaskan tujuan dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Hal ini penting agar masyarakat memahami apa yang akan dilakukan dan mengapa kegiatan tersebut diadakan. Misalnya, dalam kegiatan pelatihan atau penyuluhan, sambutan dapat menjelaskan manfaat yang diharapkan bagi masyarakat (Ananda Putra, 2023). Ramdani Priatna dari Politeknik STIA LAN Bandung menyampaikan apresiasinya dan berharap kegiatan ini dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi aparat desa dalam meningkatkan tata kelola desa, terutama dalam pembangunan desa yang unggul.



Gambar 3. Pembukaan Kegiatan PkM
Sumber: Diolah Penulis, 2024

Setelah itu, kegiatan berlanjut dengan penyampaian materi tata kelola desa yang disampaikan oleh Hendrikus T Gedeona, Iwan Kurniawan, dan Laksmi Fitriani dari Tim PkM Politeknik STIA LAN Bandung. Tujuan dari penyediaan materi adalah untuk memberikan pengetahuan kepada peserta tentang materi yang akan disampaikan. Materi yang dibahas meliputi pengetahuan tata kelola desa dan tujuan serta manfaatnya serta praktiknya. Materi disampaikan secara konvensional, melalui ceramah dan diskusi, sehingga peserta dapat memahaminya dengan baik. Peserta sangat aktif dan sangat tertarik dengan apa yang disampaikan oleh narasumber. Materi yang disampaikan banyak dibicarakan tentang arah kebijakan desa, good governance, implementasi desa unggul, pengelolaan keuangan, dan sebagainya. Berikut adalah beberapa poin penting yang dapat diangkat dari referensi yang relevan:

1. Arah Kebijakan Desa dan Good Governance

Penerapan prinsip good governance dalam pengelolaan desa sangat krusial untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan. Ardilla dan Mulyadi menekankan bahwa pengelolaan desa wisata yang baik harus melibatkan mekanisme transparansi dan akuntabilitas, serta partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan (Ardilla & Mulyadi, 2022). Hal ini sejalan dengan pandangan Rahmatullah dan Rahmatullah yang menyatakan bahwa good governance di desa harus mencakup aspek transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi dalam pengelolaan dana desa (Rahmatullah & Rahmatullah, 2021). Dengan demikian, kebijakan desa yang baik harus mengedepankan prinsip-prinsip tersebut untuk menciptakan desa yang unggul.

2. Implementasi Desa Unggul

Untuk mencapai desa yang unggul, penting untuk melibatkan masyarakat dalam setiap tahap perencanaan dan pelaksanaan program. Muarni menjelaskan bahwa musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) desa harus menjadi alat yang efektif untuk mencapai kebijakan publik yang baik. Selain itu, pengembangan sistem informasi desa (SID) juga dapat meningkatkan good governance dengan memberikan akses informasi yang lebih baik kepada masyarakat (Afnani et al., 2020). Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan sangat penting untuk keberhasilan implementasi program-program desa.

3. Pengelolaan Keuangan

Pengelolaan keuangan yang baik merupakan salah satu aspek penting dalam pembangunan desa. Basir menunjukkan bahwa pelatihan tentang pengelolaan keuangan sederhana dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai pencatatan keuangan dan strategi pemasaran, yang pada gilirannya dapat meningkatkan daya saing produk lokal (Basir et al., 2024). Selain itu, Lamawuran menekankan bahwa minimnya pengetahuan tentang pengelolaan keuangan dapat menghambat pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang efektif (Lamawuran et al., 2023). Oleh karena itu, pelatihan dan pendampingan dalam pengelolaan keuangan desa sangat diperlukan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat.

4. Peningkatan Kapasitas Masyarakat

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat juga harus fokus pada peningkatan kapasitas masyarakat dalam berbagai aspek, termasuk keterampilan manajerial dan teknis. Syam et al. menunjukkan bahwa penguatan kapasitas dalam pengelolaan BUMDes sangat penting untuk mencapai tata kelola yang baik (Syam et al., 2021). Selain itu, pendidikan dan pelatihan dalam bidang teknologi dan inovasi juga dapat membantu masyarakat dalam mengelola sumber daya alam secara lebih efektif (Yusuf et al., 2023).

Secara keseluruhan, materi yang disampaikan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus mencakup berbagai aspek yang mendukung penguatan tata kelola desa, implementasi kebijakan yang baik, dan pengelolaan keuangan yang transparan. Dengan melibatkan masyarakat secara aktif dan memberikan pelatihan yang relevan, diharapkan desa dapat berkembang menjadi desa yang unggul dan berdaya saing. Materi tersebut sangat berkaitan dengan kehidupan sehari-hari mengenai pekerjaan rutin aparat desa.



Gambar 4. Penyampaian Materi
Sumber: Diolah Penulis, 2024

Dalam upaya mewujudkan desa yang unggul, sesi diskusi dan evaluasi ini memberikan dukungan kepada peserta dalam kegiatan pengabdian yang telah dilakukan untuk mengambil langkah strategis. Diskusi dan evaluasi harus mencakup umpan balik dari peserta mengenai pelaksanaan kegiatan. Hal ini dapat dilakukan melalui diskusi dan tanya jawab terfokus. Umpan balik ini sangat berharga untuk perbaikan kegiatan di masa mendatang. Misalnya, dalam kegiatan yang dilakukan oleh Pratiwi, evaluasi dilakukan untuk menampung permasalahan yang dihadapi oleh UMKM dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan (Pratiwi et al., 2021). Dengan demikian, evaluasi dapat menjadi alat untuk meningkatkan kualitas program pengabdian di masa depan.

Dalam hal ini, dukungan tidak hanya berfokus pada evaluasi hasil kegiatan, tetapi juga pada pencarian dan pembuatan strategi yang dapat meningkatkan efektivitas dan dampak program pengabdian melalui diskusi terstruktur dan evaluasi strategis. Dengan evaluasi yang menyeluruh, peserta dapat memperoleh umpan balik. Sesi evaluasi tidak hanya berfungsi sebagai alat penilaian, tetapi juga membantu peserta bekerja sama dan menciptakan desa yang unggul dengan berbagi pengalaman terbaik dan praktik. Evaluasi kegiatan pengabdian juga harus mengukur peningkatan pengetahuan dan keterampilan peserta. Dalam pelatihan yang dilakukan oleh Sukes, peningkatan pengetahuan tentang rumah sehat diukur melalui evaluasi sebelum dan sesudah kegiatan (Sukes et al., 2020). Hal ini menunjukkan pentingnya pengukuran yang sistematis untuk menilai efektivitas program. Dengan demikian, sesi evaluasi ini tidak hanya berfungsi sebagai alat penilaian, tetapi juga berfungsi sebagai katalisator untuk perubahan positif dan pembangunan berkelanjutan di tingkat desa. Secara keseluruhan, diskusi dan evaluasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus dilakukan secara komprehensif untuk memastikan bahwa program yang dilaksanakan tidak hanya memberikan manfaat langsung, tetapi juga berkontribusi pada pengembangan masyarakat secara berkelanjutan.



Gambar 5. Diskusi dan Evaluasi
Sumber: Diolah Penulis, 2024

Pada rangkaian akhir kegiatan PkM, tim PkM dan para peserta melakukan foto bersama dan penyerahan cinderamata. Kegiatan PkM di Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung diharapkan menjadi langkah awal dari sebuah komitmen yang akan dijalankan oleh aparatur desa untuk mewujudkan pembangunan desa yang unggul.

4. KESIMPULAN

Program pengabdian kepada masyarakat di Kecamatan Paseh, Kabupaten Bandung telah berhasil meningkatkan pengetahuan peserta PkM tentang tata kelola desa dan cara mewujudkan desa yang unggul. Hasil kegiatan ini menunjukkan bahwa para aparatur desa yang menghadiri kegiatan ini lebih memahami pentingnya tata kelola desa dan menciptakan pembangunan desa yang unggul. Peserta tidak hanya mendapatkan pengetahuan teoretis, tetapi mereka juga memperoleh kemampuan praktis untuk menemukan solusi dari masalah atau hambatan yang terjadi dalam membangun desa yang unggul. Setelah itu, evaluasi kegiatan PkM menunjukkan bahwa peserta telah membuat rencana strategis yang lebih cerdas dan efisien. Kegiatan ini juga meningkatkan kesadaran aparatur desa tentang pentingnya pembangunan desa yang unggul sebagai langkah tata kelola pemerintahan desa yang efektif dan efisien, memperkuat ketahanan ekonomi desa, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

5. SARAN

Saran-saran untuk kegiatan PkM diantara lain sebagai berikut:

1. Memberikan pemahaman dasar tentang tata kelola desa kepada seluruh aparatur desa secara berkala (sesuai dengan musyawarah desa);
2. Memberikan keterampilan praktis untuk mengelola pemerintahan desa dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kepada aparatur desa dengan waktu periodik dan tidak terlalu lama rentang waktunya;
3. Memberikan bantuan langsung dan solusi khusus untuk masalah yang dihadapi oleh aparatur desa;
4. Berkolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan akan sangat penting untuk pembangunan desa seperti akademisi, pengusaha, komunitas, dan media.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu, I. N. (2020). DANA DESA DALAM PENGEMBANGAN EKONOMI LOKAL (Studi Desa Pangalloang Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba). *Indonesian Journal of Economics Entrepreneurship and Innovation*, 1(1), 29–41. <https://doi.org/10.31960/ijoei.v1i1.436>
- Adan, L. M. H., Hastuti, H., Ulfa, M., Wijaya, A. A. M., & Sa'ban, L. M. A. (2022). Pendampingan Pengelolaan Keuangan Berbasis Akuntansi Guna Meningkatkan Akuntabilitas Pemerintah Desa di Kabupaten Buton Selatan. *MALLOMO: Journal of Community Service*, 2(2), 58–65.
- Afnani, W. N., Wahyuningtyas, N., Pebrianto, M., Sholichah, A. F., & Ghandi, R. N. (2020). Pengembangan Sistem Informasi Desa (Sid) Guna Meningkatkan Good Government Di Desa Gondosuli Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung. *Jurnal Praksis Dan Dedikasi Sosial (Jpds)*, 3(2), 48. <https://doi.org/10.17977/um032v3i2p48-53>
- Ananda Putra, I. G. A. (2023). Upaya Pelestarian Lingkungan Dengan Budidaya Ikan Tawar Di Aan Secret Waterfall Kabupaten Klungkung. *Jurnal Visi Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(2), 10–18. <https://doi.org/10.51622/pengabdian.v4i2.1334>
- Ardilla, I. P., & Mulyadi, A. W. E. (2022). Penerapan Prinsip Good Governance Dalam Pengelolaan Desa Wisata Sendang Di Kabupaten Wonog. *Wacana Publik*, 2(2), 317. <https://doi.org/10.20961/wp.v2i2.66552>
- Basir, I., Adha, W. M., & Yamin, M. M. (2024). Penyuluhan Pemasaran Produk Biji Kakao Unggul Dan Pengelolaan Keuangan Sederhana Pada Kelompok Tani Pemuda Aribang Desa Pasiang. *Jurnal Abdi Insani*, 11(4), 2435–2442. <https://doi.org/10.29303/abdiinsani.v11i4.2128>
- Bismo, P., & Sahputra, R. (2021). Peningkatan Efektivitas Pembangunan Desa Melalui Penyederhanaan Penyaluran Dana Desa. *Matra Pembaruan*, 5(2), 77–88. <https://doi.org/10.21787/mp.5.2.2021.77-88>
- Blegur, I. (2022). Pelatihan Persiapan Pembelajaran Geometri Bagi Guru Kelas Rendah Pada Program Organisasi Penggerak Propinsi NTT. *Rengganis Jurnal Pengabdian Masyarakat*. <https://doi.org/10.29303/rengganis.v2i1.163>
- Cahyadi, N., & Basyari, A. S. (2023). Strategi Pengembangan Bumdes Melalui Optimalisasi Lahan Desa Sebagai Bentuk Upaya Peningkatan Pendapatan. *Dedikasimu Journal of Community Service*, 5(2), 168. <https://doi.org/10.30587/dedikasimu.v5i2.5647>
- Dor, S., Ratu Udju, H., & Lamataro, C. W. T. (2023). Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Dalam Pembangunan Desa Studi Desa Golo Munde Kecamatan Elar Kabupaten Manggarai Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur. *Comserva Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*, 3(08), 3111–3118. <https://doi.org/10.59141/comserva.v3i08.1097>
- Handoko, E. Y., & Tucunan, K. P. (2021). Pemetaan Desa Menggunakan Metode Partisipatif untuk Pembangunan Desa dan Kawasan (Desa Ngepung, Kecamatan Lengkong, Kabupaten Nganjuk, Propinsi Jawa Timur). *Sewagati*, 5(1), 30–35.
- Haryanto, S. D., Ditasari, R. A., Nuraina, E., Amalina, N. A., & Novitasari, D. A. (2023). PROGRAM “SI PEMADAM TOLAK API” (PELATIHAN DAN PENDAMPINGAN TATA KELOLA, AKUNTABILITAS DAN EVALUASI) PENYUSUNAN RKP DESA GENTONG KABUPATEN NGAWI. *Jurnal Abdi Insani*, 10(3), 1317–1327.
- Hidayat, J. T., Purnamajaya, G. N., & Wakitaningsih, N. (2023). PELATIHAN PENINGKATAN PERAN DAN FUNGSI PENDAMPING DESA DALAM SIKLUS PERENCANAAN DESA. *Rural Development For Economic Resilience (RUDENCE)*, 2(3), 13–22.
- Lamawuran, Y. D., Tokan, F. B., Medho, Y. F., Lawalu, S. P. A., Molan, K. S. H., & Niron, E. S. (2023). Pelatihan Peningkatan Kapasitas Manajemen Tata Kelola BUM Desa Berbasis Good Corporate Governance Di Desa Sandosi. *Jurnal Kreativitas Pengabdian Kepada Masyarakat (Pkm)*, 6(9), 3861–3873. <https://doi.org/10.33024/jkpm.v6i9.11264>
- Mesa, J. B., & Udju, H. R. (2023). Peran Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Desa Soba Rade Dan Desa Puu Mawo, Kabupaten Sumba Barat (UU No. 6 Tahun 2014). *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*,

- 4(5), 625–635. <https://doi.org/10.59141/jist.v4i5.621>
- Munanjar, A., Susilowati, S., Giantika, G. G., & Utomo, I. W. (2023). *Pelatihan Desain Grafis Menggunakan Aplikasi Canva Pada Anggota PPSU Bambu Apus Jakarta Timur Dalam Pembuatan Media Cetak Poster Dan Spanduk*. 1(1), 1–14. <https://doi.org/10.54082/jpmii.257>
- Nuroniya, R. E. (2023). Pengaruh Implementasi Aplikasi Sistem Keuangan Desa, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Desa Dan Transparansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Desa Pada Pemerintahan Desa Di Kecamatan Klari Kabupaten Karawang. *El-Mal Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 5(3), 1417–1430. <https://doi.org/10.47467/elmal.v5i3.5032>
- Pratiwi, S. R., Nainggolan, Y. T., Devi, C., & Rahmawati, M. (2021). Edukasi Perpajakan Bagi UMKM Di Kota Tarakan. *Arsy Jurnal Aplikasi Riset Kepada Masyarakat*, 2(1), 14–22. <https://doi.org/10.55583/arsy.v2i1.138>
- Rahmatullah, A. F., & Rahmatullah, A. F. (2021). Good Governance Dalam Pengelolaan Dana Desa Teluk Majelis Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja*, 24–33. <https://doi.org/10.33701/jipwp.v47i1.1531>
- Sari, I. F., Hidayati, D. A., Ratnasari, Y., & Habibah, S. M. (2022). Pendampingan Pemetaan Potensi Desa Dono Arum Berbasis Asset Based Community Development Guna Mewujudkan Desa Wisata Yang Berkarakter Dan Smart Village. *Jurnal Abdi Insani*, 9(4), 1276–1286. <https://doi.org/10.29303/abdiinsani.v9i4.731>
- Sukei, T. W., Maurizka, I. R., Pratiwi, R., Kahar, M. V., Sari, D. A. P., Indriani, N. S., & Santi, S. (2020). Peningkatan Pengetahuan Rumah Sehat Dengan Metode Ceramah Dan Leaflet Di Dusun Modalan. *Jurnal Pemberdayaan Publikasi Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(2), 183–190. <https://doi.org/10.12928/jp.v4i2.1961>
- Syam, M. A., Suratno, S., & Djaddang, S. (2021). Literasi Tatakelola BUMDES (Badan Usaha Milik Desa). *Capacitarea Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(02), 67–79. <https://doi.org/10.35814/capacitarea.v1i02.1993>
- Tijow, L. M., & Abdussamad, Z. (2021). Upaya Pengembangan Potensi Desa Melalui Rancang Bangun Peraturan Desa Dudepo Kecamatan Patilanggio Kabupaten Pohuwato. *DAS SEIN: Jurnal Pengabdian Hukum Dan Humaniora*, 1(1), 50–67.
- Utami, R. R., De Yusa, V., & Lilyana, B. (2023). MENINGKATKAN KREATIVITAS PADA REMAJA MELALUI PELATIHAN DAN PEMBUATAN BUCKET SNACK SEBAGAI PELUANG USAHA. *Jurnal Abdi Insani*. <https://doi.org/10.29303/abdiinsani.v10i4.1128>
- Yanto, R., Kesuma, H. Di, Alfirini, A., Apriadi, D., & Etriya, E. (2022). Pelatihan Aplikasi Coreldraw Dalam Peningkatan Hardskill Siswa Menghadapi Dunia Kerja. *Reswara Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(1), 129–134. <https://doi.org/10.46576/rjpkpm.v3i1.1571>
- Yunas, N. S., Ramadlan, M. F. S., Damayanti, R., & Wahyudi, T. H. (2024). Penguatan Inklusi Sosial Dalam Mendorong Pembangunan Desa Yang Berkelanjutan. *Surya Abdimas*, 8(1), 93–105. <https://doi.org/10.37729/abdimas.v8i1.3441>
- Yusuf, F. K., Anindya, P., Alifiyah, N., Ardandi, A., & Putri, K. N. T. C. (2023). Pelatihan Budidaya Hidroponik Sebagai Solusi Pemanfaatan Limbah Perikanan Desa Beji Kabupaten Banyumas. *Jurnal Inovasi Pengabdian Dan Pemberdayaan Masyarakat*, 3(2), 639–646. <https://doi.org/10.54082/jippm.207>